

Asta Brata dalam Bingkai Pancasila sebagai Landasan Etika Kepemimpinan

Diana Rista^{1*}, Hamidah Ulfa Fauziah^{2*}, Wikan Sasmita^{3*}, Moh. Dwi Prayoga^{4*}

^{1*}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

^{2*} Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

^{3*} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

^{4*} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

^{1*}dirystarysta@gmail.com, ^{2*}hamidah0023fishipol2023@student.uny.ac.id,
^{3*}wikam.sasmita@unpkediri.ac.id, ^{4*}muhamaddwi119@gmail.com

Abstract

This article examines the integration of Asta Brata leadership values within the framework of Pancasila as the basis for Indonesian leadership ethics. This study is motivated by the need for a leadership model that is not only oriented towards technocratic abilities, but also rooted in the moral, ideological and local wisdom values of the nation amid the challenges of globalisation and the crisis of leadership ethics. Asta Brata, as a traditional leadership teaching in the archipelago, contains eight characteristics of leaders based on natural symbols that emphasise a balance between determination, wisdom, social responsibility, and spiritual awareness. Meanwhile, Pancasila serves as a normative and ideological foundation that guides leadership practices to be in harmony with the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Justice.

Keywords: Leadership; Asta Brata; Pancasila.

Abstrak

Artikel ini mengkaji integrasi nilai-nilai kepemimpinan Asta Brata dalam bingkai Pancasila sebagai dasar etika kepemimpinan Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan model kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknokratis, tetapi juga berakar pada nilai moral, ideologis, dan kearifan lokal bangsa di tengah tantangan globalisasi dan krisis etika kepemimpinan. Asta Brata sebagai ajaran kepemimpinan tradisional Nusantara memuat delapan watak pemimpin berbasis simbol alam yang menekankan keseimbangan antara keteguhan, kebijaksanaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual. Sementara itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dan ideologis yang menuntun praktik kepemimpinan agar selaras dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan

Kata Kunci: Kepemimpinan; Asta Brata; Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan faktor strategis yang menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan suatu bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, krisis moral, dan kompleksitas persoalan sosial-politik, dibutuhkan model kepemimpinan yang berlandaskan nilai etika dan karakter. Indonesia memiliki dua sumber nilai kepemimpinan

Article info

Received 19 Desember 2025

Revised 25 Desember 2025

Accepted 30 Desember 2025

dirystarysta@gmail.com

Copyright@2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

yang penting, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan Asta Brata sebagai ajaran kepemimpinan tradisional Nusantara. Asta Brata berakar dari kearifan lokal Jawa yang menekankan delapan watak utama pemimpin sebagai pedoman moral dan laku hidup (Choirunisa, 2021).

Kepemimpinan perlu dikaji secara mendalam karena memiliki peran strategis dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang majemuk baik dari segi suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial membutuhkan model kepemimpinan yang mampu mengelola keberagaman secara adil, bijaksana, dan berkeadaban. Tanpa landasan etika yang kuat, kepemimpinan berpotensi melahirkan ketimpangan sosial, konflik kepentingan, serta krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan administratif dan teknokratis semata, melainkan harus berakar pada nilai moral yang disepakati bersama.

Asta Brata sebagai ajaran kepemimpinan tradisional Nusantara memuat delapan prinsip watak pemimpin yang berlandaskan simbol-simbol alam, seperti bumi, air, angin, bulan, matahari, samudra, gunung, dan api. Ajaran ini menekankan keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan, ketegasan dan kelembutan, serta tanggung jawab sosial dan spiritual (Choirunisa, 2021). Secara historis, Asta Brata diajarkan kepada tokoh-tokoh pemimpin dalam epos Mahabharata dan Ramayana sebagai bekal moral dalam menjalankan amanah kekuasaan (Pudja, 1984 dalam Sudarmiati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Asta Brata dirancang sebagai pedoman etis bagi pemimpin agar mampu menciptakan keharmonisan kehidupan atau *memayu hayuning bawana*, artinya kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman normatif dalam praktik kepemimpinan nasional. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi prinsip dasar yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pemimpin (Pasaribu, 2024). Pancasila bersifat terbuka dan dinamis, sehingga mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai fundamentalnya sebagai jati diri bangsa. Dalam konteks kepemimpinan, Pancasila berperan sebagai kompas moral yang menjaga agar kekuasaan dijalankan secara adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepemimpinan Pancasilais menuntut integritas, kebijaksanaan, serta keberpihakan pada kepentingan umum.

Namun, dalam praktik kepemimpinan modern, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal seperti Asta Brata sering kali mengalami reduksi makna. Pola kepemimpinan yang pragmatis, transaksional, dan berorientasi pada kekuasaan jangka pendek cenderung mengabaikan dimensi etika dan moral. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal kepemimpinan dengan realitas empiris di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konseptual untuk mengintegrasikan nilai-nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila sebagai satu-kesatuan etika kepemimpinan bangsa. Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat model kepemimpinan Indonesia yang berakar pada ideologi negara sekaligus kearifan lokal Nusantara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kepemimpinan dalam Asta Brata, mengkaji Pancasila sebagai landasan etika kepemimpinan nasional, serta menjelaskan relevansi dan integrasi nilai-nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila sebagai dasar etika kepemimpinan. Kajian ini menjadi penting dalam menjawab tantangan krisis etika kepemimpinan di tengah dinamika globalisasi dan kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan konsep kepemimpinan Pancasilais yang berkarakter, berkeadaban, dan berorientasi pada keadilan sosial.

2. KAJIAN TEORI

Kepemimpinan dalam perspektif ilmu sosial dan humaniora dipahami sebagai proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan bermakna. Teori kepemimpinan tidak hanya menekankan aspek struktural dan manajerial, tetapi juga dimensi etis, moral, dan kultural. Kepemimpinan modern yang berkelanjutan menuntut integrasi antara kompetensi teknokratis dan karakter moral, karena kepemimpinan tanpa fondasi etika berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan publik (Labolo, 2023).

Konsep kepemimpinan ideal tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai normatif yang mengarahkan perilaku individu maupun penyelenggara negara (Hidayat, 2017). Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan kepemimpinan dalam kerangka tanggung jawab spiritual dan moral; nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia; nilai Persatuan Indonesia menuntut kepemimpinan yang mampu mengelola keberagaman; nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan prinsip demokrasi deliberatif; serta nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengarahkan kepemimpinan pada pencapaian kesejahteraan yang merata. Kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan sistem etika kepemimpinan yang bersifat holistik dan kontekstual.

Selain Pancasila, Indonesia juga memiliki sumber nilai kepemimpinan yang berasal dari kearifan lokal Nusantara, salah satunya adalah ajaran Asta Brata. Asta Brata merupakan ajaran kepemimpinan tradisional yang berakar dari tradisi Jawa dan bersumber dari epos Mahabharata dan Ramayana (Dana, 2025). Secara konseptual, Asta Brata memuat delapan watak utama pemimpin yang disimbolkan melalui unsur-unsur alam, yaitu bumi, air, angin, bulan, matahari, samudra, gunung, dan api. Setiap simbol alam merepresentasikan nilai moral dan sikap mental yang harus dimiliki pemimpin, seperti keteguhan, keluwesan, keadilan, keteduhan, ketegasan, kebijaksanaan, kewibawaan, dan semangat perubahan. Asta Brata berorientasi pada tujuan luhur kepemimpinan, yakni memayu hayuning bawana, yang menekankan terciptanya keharmonisan antara manusia, masyarakat, alam, dan Tuhan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Asta Brata memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan karakter kepemimpinan. Choirunisa (2021) menegaskan bahwa Asta Brata merupakan sumber etika kepemimpinan yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Pasaribu (2024) dan Pudyastuti (2024) menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam praktik kepemimpinan nasional, terutama dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial di tengah keberagaman. Sementara itu, Sudarmiati (2020) menekankan bahwa ajaran Asta Brata tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memiliki daya aplikatif dalam konteks kepemimpinan modern. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penting dalam memahami posisi Asta Brata dan Pancasila sebagai sumber etika kepemimpinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian penelitian terletak pada analisis konseptual dan teoritis mengenai kepemimpinan dalam perspektif Asta Brata dan Pancasila, yang seluruh datanya dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang menekankan penelusuran, pemahaman, serta analisis kritis terhadap literatur yang relevan guna membangun kerangka pemikiran ilmiah secara sistematis.

Penelitian studi kepustakaan memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai bahan utama penelitian, seperti buku teks, karya ilmiah, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kepemimpinan, Pancasila, dan ajaran Asta Brata. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, wawancara, maupun observasi langsung, melainkan berfokus pada penggalan data sekunder yang tersedia di perpustakaan maupun basis data digital akademik. Data pustaka tersebut dipandang memadai untuk menjawab permasalahan penelitian karena topik yang dikaji bersifat normatif, filosofis, dan konseptual.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca dan mengutip literatur, tetapi sebagai proses ilmiah yang mencakup pengumpulan data, pencatatan sistematis, pengelompokan konsep, serta pengolahan dan analisis bahan pustaka secara mendalam. Peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus kajian, kemudian menelaah isi literatur untuk menemukan konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan etika kepemimpinan berbasis Pancasila dan kearifan lokal Asta Brata.

Penggunaan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, rumusan masalah penelitian menuntut jawaban yang bersifat teoritis dan konseptual sehingga tidak memerlukan data empiris lapangan. Kedua, kajian pustaka diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep kepemimpinan etis, baik dari perspektif ideologi negara maupun tradisi budaya Nusantara. Ketiga, sumber-sumber pustaka yang tersedia diyakini mampu memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam menjelaskan relevansi dan integrasi nilai-nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila.

Data yang digunakan sebagian besar merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pemikiran, penelitian, dan dokumentasi pihak lain. Data tersebut bersifat siap pakai sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan langsung berhadapan dengan teks, dokumen, dan hasil kajian yang telah tersedia. Meskipun bersumber dari tangan kedua, data pustaka tetap memiliki validitas ilmiah karena berasal dari karya akademik dan sumber terpercaya.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah dan menafsirkan isi literatur secara kritis untuk menemukan makna, pola, dan keterkaitan antar konsep. Analisis ini digunakan untuk mengkaji hakikat kepemimpinan dalam Asta Brata, memahami Pancasila sebagai dasar etika kepemimpinan nasional, serta menjelaskan bentuk integrasi nilai-nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai model kepemimpinan Indonesia yang berakar pada ideologi negara dan kearifan lokal bangsa

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hakikat Kepemimpinan dalam Asta Brata

Penggunaan Asta Brata merupakan ajaran kepemimpinan tradisional Nusantara yang memiliki kedalaman filosofis dan etika moral yang kuat dalam tradisi Jawa. Secara etimologis, asta berarti delapan dan brata berarti laku atau pedoman hidup (Choirunisa, 2021). Asta Brata dimaknai sebagai delapan prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ajaran ini berorientasi pada tujuan luhur kepemimpinan, yaitu memayu hayuning bawana, yang berarti menciptakan keharmonisan antara manusia, masyarakat, alam, dan Tuhan.

Ajaran Asta Brata bersumber dari kisah pewayangan dalam epos Mahabharata dan Ramayana (Widiastawan, 2019). Ajaran ini dalam Mahabharata disampaikan oleh Begawan Kesawasidi (penjelmaan Kresna) kepada Raden Arjuna. Ajaran Asta Brata juga disampaikan oleh Sri Rama kepada Wibisana pada saat penobatannya sebagai Raja Alengka Pura. Selain itu, ajaran yang sama juga diberikan kepada Bharata ketika ia

dinobatkan sebagai Raja Ayodhya Pura untuk menggantikan Sri Rama yang harus menjalani masa pembuangan di hutan selama dua belas tahun (Pudja, 1984:54) dalam (Sudarmiati, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa Asta Brata sejak awal telah diposisikan sebagai bekal moral dan spiritual bagi seorang pemimpin yang akan menjalankan amanah kekuasaan.

Asta Brata juga telah diimplementasikan dalam praktik kepemimpinan tokoh-tokoh besar seperti Sri Kresna, Yudhistira, Empu Kuturan di Bali ketika menjabat sebagai Bhagawanta atau penasihat raja, serta Sri Rama sendiri. Menurut (Sudharta, 2009) Asta Brata mengandung makna sebagai delapan sikap mental utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang meliputi Indra Brata, Yama Brata, Surya Brata, Candra Brata, Bayu Brata, Kuwera Brata, Baruna Brata, dan Agni Brata. Delapan sikap tersebut menjadi representasi nilai-nilai pengendalian diri, kebijaksanaan, keteguhan moral, serta tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan.

Raden Ngabei Yasadipura Tus Pajang atau yang lebih terkenal dengan sebutan Yasadipura I (lahir 1729 – wafat 1803), seorang pujangga besar Keraton Surakarta mengkategorikan delapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Serat Rama Jarwa (Miliarti, 2024). Delapan watak tersebut disimbolkan melalui unsur-unsur alam sebagai berikut:

1) Watak Bumi (*Mahambeg Mring Kisma*)

Watak bumi melambangkan keteguhan, kerendahan hati, dan sifat mengayomi. Seorang pemimpin harus kokoh dalam prinsip, tidak congkak, serta mampu menjadi tempat berpijak dan berlindung bagi rakyat. Bumi menanggung beban di atasnya tanpa mengeluh, sebagaimana pemimpin harus siap memikul tanggung jawab besar dengan penuh kesabaran.

2) Watak Air (*Mahambeg Mring Warih*)

Air melambangkan keluwesan, kesederhanaan, dan kemampuan beradaptasi. Pemimpin dituntut untuk merakyat, tidak berjarak dengan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi perbedaan.

3) Watak Angin (*Mahambeg Mring Samirana*)

Angin melambangkan keadilan dan pemerataan. Pemimpin harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Angin dapat dirasakan oleh semua makhluk tanpa membedakan, sebagaimana pemimpin harus adil dalam memperlakukan rakyatnya.

4) Watak Bulan (*Mahambeg Mring Candra*)

Bulan melambangkan kelembutan, keteduhan, dan ketenteraman. Pemimpin dituntut untuk menghadirkan rasa aman, damai, dan menyejukkan di tengah masyarakat. Sikap ini penting agar kepemimpinan tidak dijalankan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan.

5) Watak Matahari (*Mahambeg Mring Surya*)

Matahari melambangkan sumber energi, kehidupan, dan ketegasan. Pemimpin harus mampu memberi arah, semangat, dan inspirasi bagi rakyat. Seperti matahari yang memberi cahaya tanpa pilih kasih, pemimpin harus adil, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

6) Watak Samudra (*Mahambeg Mring Samodra*)

Samudra melambangkan keluasan hati, kesabaran, dan kebijaksanaan. Pemimpin harus mampu menampung berbagai perbedaan, kritik, dan aspirasi rakyat. Seperti samudra yang menerima segala aliran sungai, pemimpin dituntut untuk tidak sempit dalam berpikir dan tidak mudah tersulut emosi.

7) Watak Gunung (*Mahambeg Mring Wukir*)

Gunung melambangkan keteguhan, kekuatan, dan kewibawaan. Pemimpin harus kokoh dalam pendirian, tidak mudah goyah oleh tekanan, serta mampu menjadi pilar

stabilitas sosial dan politik. Gunung menjadi penopang keseimbangan alam, sebagaimana pemimpin menjadi penopang keteraturan masyarakat.

8) Watak Api (*Mahabeg Mring Dahana*)

Api melambungkan semangat, keberanian, dan daya perubahan. Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat rakyat, mendorong kemajuan, serta berani mengambil keputusan. Namun, sebagaimana api harus dikendalikan agar tidak membakar, pemimpin juga harus bijak agar kekuasaannya tidak bersifat destruktif.

4.2 Hakikat Kepemimpinan dalam Pancasila

Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sekaligus menjadi landasan etis bagi praktik kepemimpinan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam membentuk karakter pemimpin yang berintegritas, berkeadaban, dan berorientasi pada kepentingan umum. Menurut pandangan Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. dalam (Fakrizal, 2023) istilah Pancasila sesungguhnya telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Hal ini dibuktikan melalui penggunaannya dalam karya sastra klasik, yakni *Negarakertagama* yang disusun oleh Empu Prapanca dan *Sutasoma* karya Empu Tantular.

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun atas dua kata, yaitu *panca* yang berarti lima dan *śīla* yang berarti dasar atau prinsip. Secara konseptual, *śīla* juga dimaknai sebagai norma yang menjadi landasan perilaku individu maupun kehidupan suatu bangsa, mencakup tata krama, keluhuran budi, serta nilai moral yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nilai dasar Kepemimpinan dalam Pancasila :

- 1) Nilai pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan kepemimpinan dalam bingkai spiritualitas dan tanggung jawab transendental. Seorang pemimpin Pancasila diyakini tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasaribu, 2024). Kesadaran ini membentuk sikap kepemimpinan yang jujur, amanah, dan bermoral, karena setiap keputusan dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban spiritual. Nilai ketuhanan ini menjadi fondasi utama yang menuntun arah kepemimpinan agar tidak menyimpang dari prinsip kebenaran dan keadilan.
- 2) Nilai kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa kepemimpinan harus menjunjung tinggi martabat manusia. Pemimpin dituntut untuk bersikap adil, menghargai hak asasi manusia, serta menunjukkan kepedulian sosial terhadap seluruh lapisan Masyarakat (Pasaribu S., 2024). Kepemimpinan yang berlandaskan kemanusiaan tidak boleh bersifat represif, diskriminatif, atau eksploitatif, melainkan harus mengedepankan sikap empati, perlindungan, dan keberpihakan pada kemanusiaan.
- 3) Nilai ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berorientasi pada keutuhan bangsa. Pemimpin diharapkan mampu mengelola perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai persatuan nasional (Pudyastuti, 2024). Nilai persatuan melahirkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kepemimpinan yang mengedepankan persatuan akan mencegah konflik horizontal dan memperkuat integrasi nasional.
- 4) Nilai keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mencerminkan dasar demokrasi dalam kepemimpinan Pancasila. Pemimpin tidak bersifat otoriter, melainkan lahir dari kehendak rakyat dan menjalankan kekuasaan dengan prinsip musyawarah, partisipasi, serta kebijaksanaan (Fazillah, 2023). Kepemimpinan demokratis menuntut keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, kemampuan berdialog, serta

kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama.

- 5) Nilai kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari kepemimpinan Pancasila. Pemimpin dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjamin akses keadilan bagi seluruh rakyat (Rachbini, 2020). Keadilan dalam kepemimpinan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan budaya. Kepemimpinan Pancasila harus berpihak pada kelompok yang lemah tanpa mengabaikan prinsip keteraturan dan hukum

Kelima sila Pancasila tersebut membentuk satu kesatuan sistem nilai yang saling menguatkan dalam praktik kepemimpinan. Pancasila digambarkan sebagai “perisai ideologis” yang melindungi peradaban bangsa dari pengaruh negatif globalisasi dan perubahan zaman (Ras, 2022). Visualisasi Burung Garuda dengan perisai Pancasila di dada melambangkan harapan para pendiri bangsa agar kepemimpinan Indonesia selalu berorientasi pada masa depan, bersikap tegas, mengayomi, waspada, serta mampu bertahan dalam berbagai tantangan.

4.3 Integrasi Nilai-Nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila

Integrasi nilai-nilai Asta Brata dalam bingkai Pancasila menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara kearifan lokal Nusantara dengan ideologi bangsa Indonesia. Asta Brata yang menekankan delapan watak kepemimpinan berbasis unsur alam sejatinya memiliki kesesuaian yang substansial dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Kedua sistem nilai ini sama-sama menempatkan kepemimpinan sebagai amanah moral yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Asta Brata dapat dipandang sebagai bentuk kultural dari nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam tradisi kepemimpinan Nusantara.

Watak bumi melambangkan kerendahan hati, keteguhan, dan kepedulian terhadap rakyat memiliki keterkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang pemimpin yang berwatak bumi akan mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Watak air (*mahambeg mring warih*) yang melambangkan keluwesan dan kemampuan merangkul semua kalangan sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena menuntut pemimpin untuk mampu menyatukan perbedaan dalam bingkai kebangsaan.

Watak angin yang bermakna keadilan dan pemerataan selaras dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Pemimpin yang berwatak angin akan bersikap adil, tidak memihak, serta mampu menjamin ruang musyawarah yang setara bagi seluruh rakyat. Watak bulan yang memberi keteduhan dan ketenangan mencerminkan nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, karena menunjukkan sikap kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenteraman yang lahir dari kesadaran spiritual.

Watak matahari sebagai sumber kehidupan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemimpin yang berwatak matahari dituntut mampu menjadi sumber kesejahteraan dan penggerak kemajuan bagi seluruh masyarakat. Watak samudra melambangkan kelapangan hati dan kebijaksanaan berkaitan erat dengan nilai persatuan dan kemanusiaan dalam Pancasila, sebab pemimpin harus mampu menerima perbedaan serta mengelola keberagaman secara adil dan bijak.

Watak gunung menggambarkan keteguhan dan kewibawaan memiliki relevansi dengan keseluruhan sila Pancasila, khususnya dalam menjaga stabilitas negara dan konsistensi nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, watak api melambangkan semangat dan daya juang sejalan dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara yang

terkandung dalam seluruh sila Pancasila, terutama dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Relevansi nilai-nilai Asta Brata dalam kepemimpinan Pancasilais tercermin dalam kesamaan tujuan moral yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya kepemimpinan yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Watak bulan yang menyejukkan mencerminkan nilai ketuhanan yang membimbing pemimpin untuk bersikap arif dan penuh welas asih. Watak angin yang bermakna keadilan sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan musyawarah. Sementara itu, watak samudra yang melambangkan keluasan hati dan kebijaksanaan sangat relevan dengan semangat persatuan dalam keberagaman. Hal ini menegaskan bahwa Asta Brata tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan justru memperkaya implementasi nilai-nilai kepemimpinan Pancasila.

Nilai-nilai Asta Brata dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, pendidikan, organisasi, dan dunia usaha. Seorang pemimpin yang berwatak gunung akan tampil tegas dan berwibawa dalam mengambil keputusan, sementara watak air mendorong pemimpin untuk tetap membumi dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Watak api diwujudkan dalam kemampuan pemimpin untuk membangkitkan semangat perubahan dan inovasi, sedangkan watak samudra tercermin dalam sikap terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Dengan demikian, Asta Brata dapat menjadi pedoman praktis dalam membangun kepemimpinan yang adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai moral.

Asta Brata juga berfungsi sebagai penguat etika kepemimpinan berbasis Pancasila karena memberikan dimensi kultural yang lebih membumi dalam pengamalan nilai-nilai ideologi negara. Pancasila sebagai sistem nilai normatif memerlukan instrumen kultural agar dapat diinternalisasi secara efektif dalam perilaku pemimpin. Asta Brata berperan sebagai jembatan antara nilai ideologis Pancasila dengan praktik konkret kepemimpinan sehari-hari. Integrasi keduanya akan melahirkan model kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara ideologis, tetapi juga berakar pada kearifan lokal bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemimpinan menuntut landasan etika yang kuat dan berakar pada nilai-nilai ideologis serta kearifan lokal bangsa. Asta Brata sebagai ajaran kepemimpinan tradisional Nusantara menghadirkan delapan watak pemimpin yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan, kebijaksanaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual, sehingga relevan untuk menjawab tantangan krisis etika kepemimpinan di era modern. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara dan sistem etika publik, yang menuntun pemimpin untuk bertindak berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Integrasi Asta Brata dalam bingkai Pancasila menunjukkan adanya titik temu substantif antara ideologi negara dan kearifan lokal, di mana delapan watak kepemimpinan Asta Brata dapat memperkaya dan menguatkan implementasi nilai-nilai kepemimpinan Pancasila secara lebih kontekstual dan membumi.

Integrasi Asta Brata dalam Bingkai Pancasila sebagai Landasan Etika Kepemimpinan, penting untuk menjembatani kesenjangan antara nilai ideal dan realitas empiris yang sering kali ditandai oleh pragmatisme dan reduksi makna etika. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan nasional perlu diarahkan pada upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila yang didukung oleh instrumen kultural seperti Asta Brata, baik melalui pendidikan kepemimpinan, pembinaan organisasi, maupun praktik pengambilan kebijakan publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka normatif dan Asta Brata sebagai pedoman etis-kultural, kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga

berkarakter, berkeadaban, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirunisa, E. I. (2021). Internalisasi Filsafat Jawa Asta Brata Sebagai Penguatan Karakter Kepemimpinan Guru BK pada Lingkup Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang.
- Dana, G. W. (2025). Pāramitāning Prajā, Kunci Sukses Pemimpin dan Kepemimpinan (Perspektif Ajaran Hindu. Nilacakra.
- Fakrizal. (2023). NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM PANCASILA. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra.
- Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. Intelektualita 12.1 .
- Hidayat, A. (2017). Negara hukum berwatak Pancasila. Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum.
- Iqbal, M. M. (2022, Maret Jum'at, 21). Jawapos. Retrieved from <https://www.jawapos.com/>: <https://www.jawapos.com/zodiak/015792904/5-weton-lakuning-bumi-menurut-primbon-jawa-begini-kepribadian-rezeki-dan-nasib-mereka>
- Labolo, M. e. (2023). Etika pemerintahan.
- Miliarti, S. (2024, November 21). Kebatinan Mangkunegaran IV pada Upaya Pencegahan Korupsi dan Transformasi Memimpin Diri Sendiri. Retrieved from Kompasiana.com:https://www.kompasiana.com/sasimiliarti7361/673f36a934777c171b2edb22/kebatinan-mangkunegaran-iv-pada-upaya-pencegahan-korupsi-dan-transformasi-memimpin-diri-sendiri?page=all&page_images=2
- Pasaribu, S. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN. Jurnal Pembumian Pancasila 4.2, 110-122.
- Pudyastuti, E. (2024). MENEKANKAN PENTINGNYA MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KEBERAGAMAN SUKU, AGAMA, RAS DAN GOLONGAN BAGI GENERASI MUDA. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Digital (JUPED), 1-5.
- Rachbini, D. J. (2020). Musuh Bangsa Bernama Kesenjangan Sosial. Indef.,
- Ras, P. A. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan 6.1 .
- Sudarmiati, N. (2020). Landasan Ajaran Asta Brata Dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah Di SMA N 7 Luwu Timur. Widyalyaya: Jurnal Ilmu Pendidikan 1.2, 221-232.
- Sudharta, T. R. (2009). Kepemimpinan Hindu Asta Brata dan Nasehat Sri Rama Lainnya. Paramita.
- Widiastrawan, N. A. (2019). Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Fragmentari Katundung Sita Pada Pesta Kesenian Bali Ke 38 Tahun 2016. Jurnal Penelitian Agama Hindu 3.3, 233-241.